

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN
TERHADAP MASYARAKAT DESA UNTUK MEMINIMALISIR KONFLIK
ANTAR WARGA DI DESA IKHWAN DAN DOLODUO, KECAMATAN
DUMOGA BARAT DITINJAU DALAM PASAL 26 UNDANG-UNDANG RI
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Oleh

Taufik N. Saidi

Nim : 271414110

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Nirwan Junus, SH., MH
NIP 196906022000032001



Ismail H. Tomu, SH., MH
NIP 197706172009121003

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Suwitno Y. Imran SH. MH
NIP 198306222009121004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP MASYARAKAT DESA UNTUK MEMINIMALISIR KONFLIK ANTAR WARGA DI DESA IKHWAN DAN DOLODUO, KECAMATAN DUMOGA BARAT DITINJAU DALAM PASAL 26 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG

DESA

Oleh

TAUFIK. N. SAIDI

NIM. 271 414 110

Telah diperbaiki berdasarkan saran penguji:

1. **MUTIA CHERAWATY THALIB, S.H., M.Hum** (.....) 
NIP. 196907041998022001
2. **DOLOT, A. BAKUNG, S.H., M.H.** (.....) 
NIP. 1985082720091005
3. **NIRWAN JUNUS, S.H., M.H.** (.....) 
NIP. 19690602200003 2 001
4. **ISMAIL. H. TOMU, S.H., M.H.** (.....) 
NIP. 197706172009121003

MENGETAHUI

DEKAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Mohammad Rusdianto U. Puluhulawa, S.H., M.Hum.

NIP. 197001105 199703 1 001

ABSTRAK

TAUFIK N. SAIDI, 2714141110, PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP MASYRAKAT DESA UNTUK MEMINIMALISIR KONFLIK ANTAR WARGA DI DESA IKHWAN DAN DOLODUO KECAMATN DUMOGA BARAT DITINJAU DALAM PASAL 26 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, DI BAWAH PEMBIMBING I Hj. NIRWAN JUNUS, SH.,MH DAN PEMBIMBING II ISMAIL H. TOMU SH.,MH., PROGRAM ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran dari Pemerintah Desa dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat Desa untuk meminimalisir Konflik antar warga di Desa Ikhwan dan Doloduo kecamatan Dumoga Barat ditinjau dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi kendala Pemerintah Desa dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa di Desa di Desa Ikhwan dan Doloduo Kecamatan Dumoga Barat.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian Hukum Empiris, adapun lokasi penelitiannya dilakukan di Desa Ikhwan dan Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari Bapak Arifin Buchari SE selaku Kepala Desa di Desa Ikhwan dan Bapak Wawan Bonde selaku Sekretaris Desa di Desa Dolodo Kecamatan Dumoga Barat serta data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan serta saksi-saksi yang berhubungan dengan penelitian skripsi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara angket/kuisisioner, serta observasi dan studi kepustakaan. Analsisi yang digunakan adalah analisis kualitatif dimana data yang dianalisis melalui dua tahap yaitu memproduksi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat Desa untuk meminimalisir konflik antar warga di Desa Ikhwan Kecamatan Dumoga Barat ditinjau dalam Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 6 tentang Desa mengalami banyak kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan masyarakat Desa, kendala tersebut bersumber dari pemuda Desa yang kegiatan mereka dapat memicu timbulnya konflik antar masyarakat Desa dikarenakan tidak adanya PERDES (Peraturan Desa) tentang Larangan Penjualan Miras Secara Ilegal dan masih kurangnya anggaran oprasional dalam proses pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah, Pembinaan, Konflik

ABSTRACT

SAIDI, TAUFIK N, STUDENT ID: 271414110, THE ROLE OF THE LOCAL GOVERNMENT IN FOSTERING THE VILLAGE COMMUNITY TO MINIMIZE THE CONFLICT BETWEEN THE COMMUNITY OF IKHWAN AND DULODUO VILLAGE, DUMOGA BARAT DISTRICT UNDER ARTICLE 26, ACT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 6 OF 2014 CONSIDERING VILLAGES. PRINCIPAL SUPERVISOR: HJ. NIRWAN JUNUS, SH., MH CO-SUPERVISOR: ISMAIL H. TOMU SH., MH. DEPARTMENT OF LAW, FACULTY OF LAW UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

The purposes of this study are to identify and to analyze the role of the Local Government in fostering the village community to minimize the conflict between community in the Village of Ikhwan and Doloduo, Dumoga Barat district under Article 26 of Act of The Republic of Indonesia Number 6 of 2014 considering Villages as well as to explore the factors hindering the Local Government in fostering the community in the site area.

Based on the purpose of the research, this descriptive study is categorized as empirical law research. It was conducted in Ikhwan Village and Doloduo Village, Dumoga Barat Sub-district, Bolaang Mongondow Regency, North Sulawesi Province. The primary data were from Arifin Buchari SE as the village chief of Ikhwan Village and Wawan Bonde as Sub-district Secretary of Doloduo Village, Dumoga Barat District. Furthermore, the secondary data were from the literature review and the witnesses related to this study. Data collection techniques were conducted by questionnaire/interviews, as well as observation and literature study. The data analysis employed qualitative method through two steps, namely producing the data and drawing the conclusion.

The result reveals that there are several obstacles in fostering the village community to minimize the conflict between the community in the Village of Ikhwan and Doloduo, Dumoga Barat district under Article 26 of Act of The Republic of Indonesia Number 6 of 2014 considering villages. Further, the source of the conflict is from the youth activities which could lead to conflict between communities as there is not stated on Regional Regulation (PERDES) regarding the Alcohol Illegal Sale Prohibition as well as the lags of the operational budget in the process of fostering the peacefulness and the order of the village community.

Keywords: Role, Government, Fostering, Conflict

